

**PERUBAHAN RENCANA
KERJA DINAS KEARSIPAN
DAN PERPUSTAKAAN
KOTA DEPOK**

TAHUN 2021

**Jalan Margonda Raya No. 54
Kota Depok**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	12
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok sampai dngan TW II	12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok..	26
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok	47
2.4. Review Usulan Program dan Kegiatan Dinas	47
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	49
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	49
3.2. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok	51
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	54
Program dan Kegiatan	54
BAB V PENUTUP	62
A Catatan Yang Perlu Mendapat Perhatian	63
B Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	63
C Rencana Tindak Lanjut	64

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan suatu wilayah, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Cakupan perencanaan pembangunan harus memperhatikan terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik dokumen perencanaan antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021, pemerintah dihadapkan pada masalah kesehatan, yaitu COVID-19, sejak ditetapkannya sebagai pandemi di dunia, penambahan kasus positif di Kota Depok terus menunjukkan perkembangan meningkat. Untuk di Indonesia sendiri, khususnya di Kota Depok, Virus Covid 19, merupakan kasus pertama di Indonesia. Dengan eskalasi penambahan kasus, ditetapkan Keputusan Wali Kota Depok Nomor 360/137/Kpts/DPKP/Huk/2020 tentang Penetapan Status tanggap Darurat Bencana Virus Corona Disease 2019 (Covid 19) di Kota Depok tanggal 18 Maret 2020. Dengan terus terjadinya peningkatan jumlah kasus positif dan persebaran semakin meluas, memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini, pencegahan dan penanganan

menjadi salah satu prioritas perencanaan tahun 2021 selain pemulihan ekonomi pasca pandemic Covid-19.

Oleh karena itu, pada tahun 2021, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa RKPD harus memuat :

1. Substansi Perubahan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan Perwali RKPD;
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan;
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/kegiatan, target keluaran kegiatan total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Perubahan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok merupakan dokumen resmi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah setelah memperhatikan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) .

Perangkat Daerah sebagai salah satu stakeholder kunci di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana, melalui penyusunan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah, yang kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah. Hal ini mengacu pada pasal 7 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana

Kerja Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok melakukan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2021 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
18. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat *Corona Virus Disease* (COVID-19);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 326);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
26. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
27. Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

29. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023;
32. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;
33. Keputusan Gubernur Jawa Barat No.443/Kep.189- Huham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Barat;
34. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2011);
35. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 2032 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
37. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

- Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 21)
38. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
 39. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 40. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2021;
 41. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 52 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2021;
 42. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pedoman untuk menyempurnakan penyusunan RKA PD Tahun 2021. Hasil evaluasi pelaksanaan renjana kerja tahun berjalan menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan. Penyesuaian-penyempurnaan

dimaksud selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 356 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Plafon dan Prioritas Anggaran (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2020 untuk menyusun perubahan APBD Tahun 2021.

1.3.2. MAKSUD

1. Merubah prioritas program/kegiatan/sub kegiatan daerah menyesuaikan dengan sasaran daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD tahun 2016-2021;
2. Menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini;
3. Memberikan dasar dalam penggunaan silpa untuk pendanaan kegiatan tahun 2021;
4. Memberikan dasar dalam penambahan kegiatan/subkegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan pagu kegiatan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2021

disusun dengan sistematika sesuai Permendagri 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Rencana KerjaK/L dan Rencana Kerja Provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan penyusunan RAPBD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN PERUBAHAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Memuat penjelasan tentang alasan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TW II TAHUN 2021 DAN CAPAIANNYA

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan 2, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis Indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*), tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan

prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Sub bab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Kota Depok.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup di antaranya catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA DEPOK SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021 DAN CAPAIANNYA

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sampai dengan triwulan 2. Beberapa faktor yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan tersebut adalah:

1. Bangunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok yang representatif, dilengkapi dengan fasilitas pendukung dan fasilitas wifi di semua ruangan, sehingga semakin menarik masyarakat untuk berkunjung ke Perpustakaan, namun dimasa Pandemi Covid 19 kunjungan perpustakaan tidak berjalan sebagaimana mestinya, dikarenakan adanya PPKM Darurat , PPKM Mikro dan PPKM level 2 dan 4 di Kota Depok;
2. Semakin optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses dan system layanan;
3. Koleksi bahan Perpustakaan yang setiap tahun bertambah jumlahnya dan juga bervariasi judulnya;
4. Mobil Perpustakaan keliling sebanyak 4 unit, untuk melakukan layanan ke seluruh wilayah di Kota Depok sehingga dapat mengajak sejak dini dan dapat menumbuhkan minat baca kepada masyarakat khususnya anak usia sekolah;
5. Telah dilakukanya pembaharuan sistem otomasi kearsipan sehingga dapat mendukung dan menyelamatkan arsip yang bernilai guna;
6. Sarana dan prasana yang terus diupayakan pengadaannya dalam pemeliharaan arsip di Depo Arsip;

- 7 Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia melalui pendidikan formal, diklat fungsional, dan bimbingan teknis.

Capaian review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sampai dengan triwulan 2 tahun 2020, dan realisasi Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2016-2021 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.

EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA DEPOK
s/d TW II TAHUN 2021

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja

OPD :

1. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel
2. Meningkatnya standar pelayanan publik
3. Meningkatnya akses terhadap layanan perpustakaan

No	Uraian Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Perse	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-2) yang dievaluasi		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019/Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		8		9		10		13		14=6+13		15=14/5 x100%		
	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	Perse	100	1.510.000.031	100	2.022.403.190							93	410.457.773		2.432.860.963	0%	161,12 %	Diskarpus
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	Jenis	70	258.000.000	58	310.604.700							58	83.736.700	116	394.341.400	165,71 %	152,85 %	Diskarpus
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	20	153.000.000	16	244.610.050							16	54.916.050	32	299.526.100	160,00 %	195,77 %	Diskarpus

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun 2021

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	17	72.000.000	17	147.161.300						17	44.840.000	34	192.001.300	200,00%	266,67%	Diskarpus
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	Jenis	30	192.000.000	45	285.636.500						44	73.153.500	89	358.790.000	296,67%	186,87%	Diskarpus
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Makanan dan Minuman	Jenis	7	174.000.000	7	307.090.637						5	40.168.500	12	347.259.137		199,57%	Diskarpus
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Aparatur Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	OH Dlm daerah dan OH Luar Daerah	274	661.000.031	278	727.300.003						129	113.643.023	407	840.943.026	148,54%	127,22%	Diskarpus
Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	Perse	n	100	750.000.000	100	1.733.239.185						100	107.098.595	###	1.840.337.780	200,00%	####	Diskarpus
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang dipelihara	Jenis	5	140.000.000	5	140.655.200						2	30.295.000	7	170.950.200	140,00%	122,11%	Diskarpus
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	Kendaraan Roda 4, Kendaraan Roda 2	8	214.000.000	10	231.273.795						8	46.508.595	18	277.782.390	225,00%	129,80%	Diskarpus
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Perlengkapan Gedung kantor	Jenis	8	160.000.000	8	374.918.890						4	30.295.000	12	405.213.890	150,00%	253,26%	Diskarpus
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Inventaris Kantor	Jenis	7	236.000.000	5	986.391.300						-	-	5	986.391.300	71,43%	417,96%	Diskarpus

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun 2021

Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi		77%	535.500.000	100	372.055.436						0%	14.930.000	###	386.985.436	100%	72,27%	Diskarpus
	Bimtek manajemen kearsipan dan perpustakaan bagi aparatur Diskarpus	Jumlah Peserta	Orang	250	195.000.000	-	-												
	Workshop Kearsipan	Jumlah Peserta	Orang	300	240.500.000	50	37.200.000						-	-	50	37.200.000	16,67%	15,47%	Diskarpus
	Bimbingan Teknis Kearsipan	Jumlah Peserta	Orang	895	295.000.000	240	334.855.436						-	14.930.000	240	349.785.436	26,82%	118,57%	Diskarpus
Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan	Nilai Sakip		B	108.000.000	B	57.860.750						100	11.960.800	100	69.821.550	100,00%	64,65%	Diskarpus
	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	Laporan	2	108.000.000	2	57.860.750						2	11.960.800	4	69.821.550	200,00%	64,65%	Diskarpus
Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel	Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika	Cakupan Layanan E Government		###	447.000.000	100	211.075.000						100	71.612.500	200	282.687.500	200,00%	63,24%	Diskarpus
	Pengembangan Aplikasi Kearsipan Berbasis TI/ Pengembangan TI Kearsipan (2018)	Jumlah Sistem dibangun/dikembangkan	aplikasi arsip	4	365.000.000	1	132.342.500						-	-	1	132.342.500	25,00%	36,26%	Diskarpus
	Pemeliharaan Sistem Kearsipan	Jumlah Sistem dipelihara	sistem	4	82.000.000	1	78.732.500						1	71.612.500	2	150.345.000	50,00%	183,35%	Diskarpus

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun 2021

Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Cakupan Integrasi perencanaan		100%	253.000.000	###	278.296.400							50%	41.007.400	125	319.303.800	62,50	####	Diskarpus
	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	78.000.000	2	113.233.400							2	41.007.400	4	154.240.800	%		Diskarpus
	Penyusunan Raperda Kearsipan	Jumlah Dokumen	Perda Kearsipan	1	175.000.000	0	165.063.000							-	165.063.000	0	330.126.000	%		Diskarpus
Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan	Presentase Pengelolaan dan Layanan Lembaga Kearsipan Daerah		7%	7.486.827.319	21,4%	4.415.198.488							28,1	831.510.653	100	5.246.709.141	50,00%	70,08%	
	Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku	Jumlah Pengelolaan Arsip Dinamis	OPD	103	2.848.437.319	37	2.472.949.834							18	831.510.653	55	3.304.460.487	53,40%	116,01%	Diskarpus
	Penelusuran Arsip Bersejarah	Jumlah Arsip Bersejarah	Objek	8	590.000.000	17	199.430.700							-	1.386.000	17	200.816.700	212,50%	34,04%	Diskarpus
	Penambahan Khasanah Arsip Audiovisual	Jumlah Khasanah Arsip	Lomba	3	535.000.000	2	293.675.000							1	94.900.000	3	388.575.000	100,00%	72,63%	Diskarpus
	Pengembangan Pedoman Kearsipan	Jumlah Pedoman Kearsipan	Pedoman	4	395.000.000	1	64.202.500							-	-	1	64.202.500	25,00%	16,25%	Diskarpus
	Akuisisi Arsip Statis	Jumlah Arsip yang di akuisisi	Berkas	165	360.000.000	45	173.588.200							-	-	45	173.588.200	27,27%	48,22%	Diskarpus
	Sosialisasi kearsipan	Jumlah Peserta	Orang	300	367.000.000	100	100.301.000							-	45.122.000	100	145.423.000	33,33%	39,62%	Diskarpus
	Pengawasan Internal Kearsipan Kearsipan se Kota Depok	Jumlah Titik	Titik	136	790.000.000	6	191.237.000							44	85.837.000	50	277.074.000	36,76%	35,07%	Diskarpus

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun 2021

	Penyediaan Diorama/ Wall Of Fame	Jumlah Wall Of Fame	Kegiatan	4	670.000.000	2	348.415.760							2	348.415.760	50,00 %	52,00%	Diskarpus	
	Pengelolaan Pemasarakatan Arsip	Jumlah Lokasi	Lokasi	120	695.000.000	50	424.857.000							50	513.157.000	41,67 %	73,84%	Diskarpus	
	Publikasi Kearsipan melalui media cetak dan elektronik	Jumlah Publikasi Kearsipan	Publikasi	13	104.390.000	10	64.555.400							10	64.555.400	76,92 %	61,84%	Diskarpus	
	Layanan Jasa Kearsipan	Jumlah Layanan Kearsipan	Orang	340	132.000.000	100	81.986.094						90	48.611.094	190	130.597.188	55,88 %	98,94%	Diskarpus
Meningkatnya akses terhadap layanan perpustakaan	Peningkatan Minat Baca Masyarakat	Presentase Minat Baca Masyarakat		55%	2.228.245.800	45%	6.302.580.389								894.856.011				
	Penyediaan Koleksi Buku Perpustakaan	Jumlah Koleksi Bacaan atau Koleksi Bahan Pustaka Lainnya	Eks, Paket e journal, paket e book, DVD	5.202	800.000.000	###	1.729.247.094					3.001	367.560.221	###	2.096.807.315	251,90%	262,10%	Diskarpus	
	Pengelolaan Koleksi Perpustakaan	Jumlah Koleksi Perpustakaan	Eks, web	5.000	350.000.000	###	1.514.147.790					3.000	527.295.790	###	2.041.443.580	700,02%	583,27%	Diskarpus	
	Preservasi dan Konservasi	Jumlah Buku	Buku	5.000	50.000.000	###	103.456.000					500	22.500.000	3.000	125.956.000	60,00 %	251,91%	Diskarpus	
	Pembinaan Perpustakaan dengan E Library	Jumlah Perpustakaan	Perpustakaan Sekolah	5	50.000.000	20	166.575.000					2	40.080.000	22	206.655.000	440,00%	413,31%	Diskarpus	
	Bimbingan Teknis Perpustakaan bagi Pengelola Perpustakaan Sekolah	Jumlah Orang	Orang	100	100.000.000	200	260.364.000							200	260.364.000	200,00%	260,36%	Diskarpus	

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun 2021

		Pelayanan Perpustakaan Keliling	Jumlah titik	itik, Mobil	600	455.000.000	951	1.163.634.822						205	285.438.655	1.156	1.449.073.477	192,67%	318,48%	Diskarpus	
		Pemasyarakatan Gemar Membaca	Jumlah Lomba, Jumlah bedah buku, jumlah pelatihan	Jenis Lomba, X Bedah Buku, x pelatihan	8	163.245.800	23	694.583.083						-	34.575.000	23	729.158.083	287,50%	446,66%	Diskarpus	
		Pembinaan Taman Bacaan Masyarakat	Jumlah Taman Bacaan Masyarakat	TBM	10	85.000.000	22	286.055.600						-	49.779.900	22	335.835.500	220,00%	395,10%	Diskarpus	
		Pembinaan Perpustakaan Kelurahan	Jumlah Perpustakaan Kelurahan	Kelurahan	10	75.000.000	23	77.926.000						-	-	23	77.926.000	230,00%	103,90%	Diskarpus	
		Survey Minat Baca Masyarakat	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	100.000.000	2	306.591.000						-	78.871.000	2	385.462.000	200,00%	385,46%	Diskarpus	
	Meningkatnya akses terhadap layanan perpustakaan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Minat Baca Masyarakat	Persen		-	-	-	55%	1.590.636.120	11%	174.618.169	-	358.098.050	11%	532.716.219	6.288.877.008	23	25	-	
		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah buku	Buku		-	-	-	100%	23.000.000	-	-	-	8.050.000	-	8.050.000	###	111.506.000	50,00%	223,01%	Diskarpus
		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan	Perpustakaan		-	-	-	5	42.000.000	2	9.257.149	-	9.180.000	2	18.437.149	22	185.012.149	440,00%	370,02%	Diskarpus
		Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah koleksi perpustakaan yang diolah	Paket e-book; dvd; Eksemplar		-	-	-	1; 1; 3500	395.979.900	-	-	-	102.156.050	-	102.156.050	###	1.831.403.144	194,21%	228,93%	Diskarpus
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah koleksi buku	Eksemplar		-	-	-	5000	534.999.800	808	105.567.648	-	157.925.800	808	263.493.448	###	1.777.641.238	656,18%	507,90%	Diskarpus

		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	Dokumen	-	-	-	1	74.999.900	-	-	-	-	-	2	306.591.000	200,00%	306,59%	Diskarpus	
		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Cakupan layanan perpustakaan keliling	Titik	-	-	-	600	320.495.520	59	59.793.372	-	61.226.200	59	121.019.572	1.010	168,33%	282,34%	Diskarpus	
		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan kelurahan	Kelurahan	-	-	-	10	15.000.000	3	-	-	-	3	-	26	260,00%	103,90%	Diskarpus	
		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah bedah buku, jumlah lomba, jumlah pelatihan	bedah buku, lomba, pelatihan	-	-	-	3; 3; 1	184.161.000	-	-	-	19.560.000	-	19.560.000	23	714.143.083	287,50%	437,46%	Diskarpus
	Meningkatnya akses terhadap layanan perpustakaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran dan Persentase Penyediaan Sarana dan prasarana; NILAI SAKIP	Persen	-	-	-	100%	8.359.600.444	15%	1.238.290.175	-	2.038.523.633	15%	3.276.813.808		7.203.550.333	20	20	-

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja PD	Dokumen				3	87.177.000	1	19.554.000	-	21.566.000	1	41.120.000	3	154.353.400	300,00%	197,89%	Diskarpus
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	Dokumen	-	-	-	2	28.228.000	-	7.015.000	-	-	-	7.015.000	2	64.875.750	100,00%	60,07%	Diskarpus
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Anggaran	Dokumen	-	-	-	2	7.350.148.344	1	1.090.619.503	-	1.769.766.423	1	2.860.385.926	1	2.860.385.926	100,00%	100,00%	Diskarpus
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	-	-	-	17	49.995.700	13	9.930.000	-	9.823.000	13	19.753.000	30	166.914.300	176,47%	231,83%	Diskarpus
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	-	-	-	7	171.245.000	68	500.000	-	123.401.508	68	123.901.508	131	1.420.897.508	170,13%	287,63%	Diskarpus
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Jenis	-	-	-	30	75.000.000	26	16.072.000	-	19.632.000	26	35.704.000	71	321.340.500	236,67%	167,36%	Diskarpus
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman	Jenis	-	-	-	7	93.150.000	6	14.340.500	-	3.208.000	6	17.548.500	13	324.639.137	185,71%	186,57%	Diskarpus
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	Jenis	-	-	-	20	60.000.000	20	45.074.550	-	1.306.600	20	46.381.150	36	290.991.200	180,00%	190,19%	Diskarpus
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	OH dlm daerah, OH luar daerah	-	-	-	200 200	219.997.000	8	4.128.522	-	31.028.102	8	35.156.624	286	762.456.627	104,38%	115,35%	Diskarpus

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun 2021

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Bermotor	Kendaraan Roda 4, Kendaraan Roda 3, Kendaraan Roda 2	-	-	-	-	3,17	109.700.000	7	22.051.100	-	-	7	22.051.100	17	253.324.895	212,50%	118,38%	Diskarpus
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis	-	-	-	-	8	64.983.000	2	9.005.000	-	22.825.000	2	31.830.000	10	406.748.890	142,86%	172,35%	Diskarpus
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan Gedung Kantor	Gedung	-	-	-	-	2	49.976.400	-	-	-	35.967.000	-	35.967.000	5	176.622.200	100,00%	126,16%	Diskarpus
	Meningkatnya Kualitas Manajemen Dalam Pelayanan Publik	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Cakupan Layanan e-Government	Persen	-	-	-	21,4%	1.272.749.720	19%	242.117.240	-	265.693.400	19%	507.810.640		3.980.797.704	1	3	-
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah pengelolaan arsip dinamis	PD	-	-	-	-	22	872.750.000	5	233.532.151	-	230.791.200	5	464.323.351	42	2.937.273.185	40,78%	103,12%	Diskarpus
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip yang di akuisisi, Jumlah khasanah arsip	Berkas, Lomba	-	-	-	-	50,1	170.000.000	-	-	-	26.419.000	-	26.419.000	47	493.682.200	27,98%	55,16%	Diskarpus
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah pelayanan jasa kearsipan, Jumlah sistem dipelihara	Orang, Sistem	-	-	-	-	120,1	79.999.720	30	8.585.089	-	8.483.200	30	17.068.289	131	177.786.883	38,08%	83,08%	Diskarpus

		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang, Jumlah peserta workshop	Orang, Orang	-	-	-	100, 100	150.000.000	-	-	-	-	-	290	372.055.436	24,27%	69,48%	Diskarpus	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Pengelolaan dan Layanan Lembaga Kearsipan daerah	Persen	-	-	-	21,4%	122.004.000	16 %	19.204.000	-	34.150.000	16%	53.354.000	63	669.448.000	1	1	0
		Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah titik	Titik	-	-	-	25	72.214.000	7	19.204.000	-	27.450.000	7	46.654.000	13	237.891.000	9,56%	30,11%	Diskarpus
		Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Lokasi	Lokasi	-	-	-	25	49.790.000	-	-	-	6.700.000	-	6.700.000	50	431.557.000	41,67%	62,09%	Diskarpus
		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Pengelolaan dan Layanan Lembaga Kearsipan daerah	Persen	-	-	-	21,4%	34.199.900	-	-	-	-	0%	-	1	64.202.500			
		Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Pedoman Kearsipan	Pedoman	-	-	-	1	34.199.900	-	-	-	-	-	-	1	64.202.500	25,00%	16,25%	Diskarpus
	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran dan Penyediaan	Persen	-	-	-	100%	8.359.600.444	15 %	1.238.290.175	-	2.038.523.633	15%	3.276.813.808		12.169.424.690	35	15	-

			aan Sarana dan prasarana; NILAI SAKIP																	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja PD	Dokumen				3	87.177.000	1	19.554.000	-	21.566.000	1	41.120.000	24	119.046.000	240,00%	158,73%	Diskarpus
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	Dokumen	-	-	-	2	28.228.000	-	7.015.000	-	-	-	7.015.000	20	173.590.000	400,00%	347,18%	Diskarpus
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Anggaran	Dokumen	-	-	-	2	7.350.148.344	1	1.090.619.503	-	1.769.766.423	1	2.860.385.926	1	2.860.385.926	100,00%	100,00%	Diskarpus
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	-	-	-	17	49.995.700	13	9.930.000	-	9.823.000	13	19.753.000	30	219.183.700	375,00%	37,15%	Diskarpus
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	-	-	-	7	171.245.000	68	500.000	-	123.401.508	68	123.901.508	78	4.603.655.396	598,42%	60,64%	Diskarpus
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Jenis	-	-	-	30	75.000.000	26	16.072.000	-	19.632.000	26	35.704.000	28	329.379.000	933,33%	61,57%	Diskarpus
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman	Jenis	-	-	-	7	93.150.000	6	14.340.500	-	3.208.000	6	17.548.500	7	81.751.000	175,00%	20,70%	Diskarpus
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	Jenis	-	-	-	20	60.000.000	20	45.074.550	-	1.306.600	20	46.381.150	57	2.519.330.984	55,34%	88,45%	Diskarpus

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	OH dim daerah, OH luar daerah	-	-	-	-	200 200	219.997.000	8	4.128.522	-	31.028.102	8	35.156.624	53	208.744.824	32,12%	57,98%	Diskarpus
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Bermotor	Kendaraan Roda 4, Kendaraan Roda 3, Kendaraan Roda 2	-	-	-	-	3, 1, 7	109.700.000	7	22.051.100	-		7	22.051.100	9	370.466.860	225,00%	55,29%	Diskarpus
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis	-	-	-	-	8	64.983.000	2	9.005.000	-	22.825.000	2	31.830.000	52	456.687.000	400,00%	437,48%	Diskarpus
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan Gedung Kantor	Gedung	-	-	-	-	2	49.976.400	-	-	-	35.967.000	-	35.967.000	6	227.204.000	4,41%	28,76%	Diskarpus

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA DEPOK

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok berikut ini disajikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Wali Kota Depok Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok. Berdasarkan peraturan tersebut, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang berikan kepada Daerah.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok tidak mempunyai SPM/Standar Nasional, dan hanya menggunakan IKU (Indikator Kinerja Utama) sebagai indikator kinerja dalam pencapaian kinerja pelayanan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ada di Dinas Kearsipan dan perpustakaan Kota Depok sebagai berikut:

1. Indeks Pelayanan Masyarakat;
2. Nilai SAKIP;
3. Presentase Jumlah Lembaga Pemerintah Yang Telah Mengelola Arsipnya Secara Baku;
4. Presentase Minat Baca Masyarakat
5. Jumlah Pemustaka / Pengunjung yang datang ke perpustakaan umum Kota Depok
6. Jumlah Koleksi Bahan Pustaka
7. Persentase Perpustakaan di Kota Depok Yang Dibina

Pencapaian indikator kinerja utama Perangkat Daerah dari masing-masing sasaran di dukung oleh **5 Program, 12 Kegiatan** dan **27 Sub Kegiatan** dijelaskan sebagai berikut :

1. Indeks Pelayanan Masyarakat didukung Program :
 - a. Program Pembinaan Perpustakaan
 - b. Progran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/

Kota

- c. Program Perlindungan dan Penyelamatan arsip
- d. Program Pengelolaan Arsip
2. Predikat Nilai SAKIP
 - a. Progran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
3. Presentase Jumlah Lembaga Pemerintah Yang Telah Mengelola Arsipnya Secara Baku
 - a. Program Perlindungan dan Penyelamatan arsip
 - b. Program Pengelolaan Arsip
 - c. Program Perizinan Penggunaan Arsip
4. Presentase Minat Baca Masyarakat
5. Jumlah Pemustaka / Pengunjung yang datang ke perpustakaan umum Kota Depok
6. Jumlah Koleksi Bahan Pustaka
7. Persentase Perpustakaan di Kota Depok Yang Dibina
 - a. Program Pembinaan Perpustakaan

Adapun secara lebih jelas program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung indikator tersebut dapat digambarkan sebai berikut :

Tabel 2.2.
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
Penunjang Indikator Sasaran

RANCANGAN AWAL RKPD						RANCANGAN PENYESUAIAN ANGGARAN (RAPBD)													
Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Anggaran	Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Anggaran								
			Indikator Kinerja	Target					Indikator Kinerja	Target									
1	2		3	4	5	1	2		3	4	5								
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			9.788.902.344	2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		9.788.554.064							
2	24	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran dan Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran; NILAI SAKIP; Cakupan integritas perencanaan KIP;	100%; 100%; BB; 100%; 100%	8.359.948.344	2	24	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran dan Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran; NILAI SAKIP; Cakupan integritas perencanaan KIP;	100%; 100%; BB; 100%; 100%	8.359.600.444						
2	24	01	02:01	Perencanaan, Penggabungan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan integritas perencanaan, Nilai SAKIP	100%,	115.405.000	2	24	01	02:01	Perencanaan, Penggabungan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan integritas perencanaan, Nilai SAKIP	100%,	115.405.000				
2	24	01	02:01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Depok	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	87.177.000	2	24	01	02:01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Depok	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	87.177.000
2	24	01	02:01	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Depok	Jumlah Dokumen	2 Dok	28.228.000	2	24	01	02:01	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Depok	Jumlah Dokumen	2 Dok	28.228.000
2	24	01	02:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	BB	7.350.148.344	2	24	01	02:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	BB	7.350.148.344				
2	24	01	02:02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Depok	Jumlah Dokumen Anggaran	2 Dok	7.350.148.344	2	24	01	02:02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Depok	Jumlah Dokumen Anggaran	2 Dok	7.350.148.344

2	24	01	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran dan Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	100%; 100%	669.395.000	2	24	01	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran dan Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	100%; 100%	669.387.700
2	24	01	02:06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Depok	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17 Jenis	50.000.000	2	24	01	02:06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Depok	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17 Jenis	49.995.700
2	24	01	02:06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Depok	Jumlah Jenis inventaris Kantor; Jenis Alat Tulis Kantor	7 Jenis; 70 Jenis	171.245.000	2	24	01	02:06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Depok	Jumlah Jenis inventaris Kantor; Jenis Alat Tulis Kantor	7 Jenis; 70 Jenis	171.245.000
2	24	01	02:06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Depok	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	30 Jenis	75.000.000	2	24	01	02:06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Depok	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	30 Jenis	75.000.000
2	24	01	02:06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Depok	Jumlah Jenis Makanan dan Minuman	7 Jenis	93.150.000	2	24	01	02:06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Depok	Jumlah Jenis Makanan dan Minuman	7 Jenis	93.150.000
2	24	01	02:06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Depok	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	20 Jenis	60.000.000	2	24	01	02:06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Depok	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	20 Jenis	60.000.000
2	24	01	02:06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Depok	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	200 OH DD; 174 OH LD	220.000.000	2	24	01	02:06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Depok	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	200 OH DD; 174 OH LD	219.997.000
2	24	01	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran dan Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	100%	225.000.000	2	24	01	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran dan Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	100%	224.659.400
2	24	01	02:09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Depok	Jumlah Kendaraan Dinas	7 Kendaraan Roda 4; 3 kendaraan Roda 2; 1 kendaraan roda 3	110.000.000	2	24	01	02:09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Depok	Jumlah Kendaraan Dinas	7 Kendaraan Roda 4; 2 kendaraan Roda 2; 1 kendaraan roda 3	109.700.000
2	24	01	02:09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Depok	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	8 Jenis	65.000.000	2	24	01	02:09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Depok	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	8 Jenis	64.983.000
2	24	01	02:09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Grdung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Depok	Jumlah Gedung Yang Dipelihara	2 Gedung	50.000.000	2	24	01	02:09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Grdung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Depok	Jumlah Gedung Yang Dipelihara	2 Gedung	49.976.400
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		Cakupan Layanan e-Government yang terintegrasi, Persentase Pengelolaan dan Layanan Lembaga Kearsipan Daerah dan Persentase pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi		1.272.750.000	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		Cakupan Layanan e-Government yang terintegrasi, Persentase Pengelolaan dan Layanan Lembaga Kearsipan Daerah dan Persentase pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi		1.272.749.720

2	24	02	02.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pengelolaan dan Layanan Lembaga Kearsipan Daerah	21,4%	872.750.000	2	24	02	02.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pengelolaan dan Layanan Lembaga Kearsipan Daerah	21,4%	872.750.000
2	24	02	02.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis		Jumlah pengelolaan arsip dinamis		872.750.000	2	24	02	02.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis		Jumlah pengelolaan arsip dinamis		872.750.000
2	24	02	02.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pengelolaan dan Layanan Lembaga Kearsipan Daerah	21,4%	170.000.000	2	24	02	02.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pengelolaan dan Layanan Lembaga Kearsipan Daerah	21,4%	170.000.000
2	24	02	02.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kota Depok	Jumlah Arsip yang di Akuisisi		170.000.000	2	24	02	02.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kota Depok	Jumlah Arsip yang di Akuisisi		170.000.000
							Jumlah lomba										Jumlah lomba		
2	24	02	02.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota		Cakupan Layanan e-Government yang terintegrasi, Persentase Pengelolaan dan Layanan Lembaga Kearsipan Daerah dan Persentase pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi	21,4%	230.000.000	2	24	02	02.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota		Cakupan Layanan e-Government yang terintegrasi, Persentase Pengelolaan dan Layanan Lembaga Kearsipan Daerah dan Persentase pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi	21,4%	229.999.720
2	24	02	02.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN	Kota Depok	Jumlah sistem dipelihara; Jumlah pelayanan jasa kearsipan	1 sistem; 120 orang	80.000.000	2	24	02	02.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN	Kota Depok	Jumlah sistem dipelihara; Jumlah pelayanan jasa kearsipan	1 sistem; 120 orang	79.999.720
2	24	02	02.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota		Jumlah orang	100 orang;	150.000.000	2	24	02	02.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota		Jumlah orang	100 orang;	150.000.000
							Jumlah peserta workshop	100 orang									Jumlah peserta workshop	100 orang	
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		Persentase Pengelolaan dan Layanan Lembaga Kearsipan Daerah	21,4%	122.004.000	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		Persentase Pengelolaan dan Layanan Lembaga Kearsipan Daerah	21,4%	122.004.000
2	24	03	02.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		Persentase Pengelolaan dan Layanan Lembaga Kearsipan Daerah	21,4%	72.214.000	2	24	03	02.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		Persentase Pengelolaan dan Layanan Lembaga Kearsipan Daerah	21,4%	72.214.000

2	24	03	02.01	01	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kota Depok	jumlah titik	25 titik	72.214.000	2	24	03	02.01	01	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kota Depok	jumlah titik	25 titik	72.214.000
2	24	03	02.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/ Kota		Persentase Pengelolaan dan Layanan Lembaga Kearsipan Daerah	21,4%	49.790.000	2	24	03	02.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/ Kota		Persentase Pengelolaan dan Layanan Lembaga Kearsipan Daerah	21,4%	49.790.000
2	24	03	02.02	01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Kota Depok	Jumlah Lokasi	25 lokasi	49.790.000	2	24	03	02.02	01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Kota Depok	Jumlah Lokasi	25 lokasi	49.790.000
2	24	04			PROGRAM PERJINAN PENGGUNAAN ARSIP		Persentase Pengelolaan dan Layanan Lembaga Kearsipan Daerah	21,4%	34.200.000	2	24	04			PROGRAM PERJINAN PENGGUNAAN ARSIP		Persentase Pengelolaan dan Layanan Lembaga Kearsipan Daerah	21,4%	34.199.900
2	24	04	02.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/ Kota		Persentase Pengelolaan dan Layanan Lembaga Kearsipan Daerah	21,4%	34.200.000	2	24	04	02.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/ Kota		Persentase Pengelolaan dan Layanan Lembaga Kearsipan Daerah	21,4%	34.199.900
2	24	04	02.01	01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Kota Depok	Jumlah Pedoman Kearsipan	1 pedoman	34.200.000	2	24	04	02.01	01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Kota Depok	Jumlah Pedoman Kearsipan	1 pedoman	34.199.900
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				1.590.636.500	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				1.590.636.120
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Persentase Minat Baca Masyarakat	55%	1.590.636.500	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Persentase Minat Baca Masyarakat	55%	1.590.636.120
2	23	02	02.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Minat Baca Masyarakat	55%	1.070.979.900	2	23	02	02.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Minat Baca Masyarakat	55%	1.070.979.600
2	23	02	02.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kota Depok	Jumlah Buku	1000 Buku	23.000.000	2	23	02	02.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kota Depok	Jumlah Buku	1000 Buku	23.000.000
2	23	02	02.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Depok	Jumlah perpustakaan	5 Perpustakaan Sekolah	42.000.000	2	23	02	02.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Depok	Jumlah perpustakaan	5 Perpustakaan Sekolah	42.000.000
2	23	02	02.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Kota Depok	Jumlah koleksi perpustakaan	3500 eks; 1 paket e-book; 1 paket dvd	395.980.000	2	23	02	02.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Kota Depok	Jumlah koleksi perpustakaan	3500 eks; 1 paket e-book; 1 paket dvd	395.979.900

2	23	02	02:01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kota Depok	Jumlah Koleks Perpustakaan	5000 Eksp	535.000.000	2	23	02	02:01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kota Depok	Jumlah Koleks Perpustakaan	5000 Eksp	534.999.800
2	23	02	02:01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Depok	Jumlah dokumen	1 Dok	74.999.900	2	23	02	02:01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Depok	Jumlah dokumen	1 Dok	74.999.900
2	23	02	02:02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Minat Baca Masyarakat	55%	519.656.600	2	23	02	02:02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Minat Baca Masyarakat	55%	519.656.520
2	23	02	02:02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Kota Depok	Cakupan Layanan Perpustakaan Keliling	600 titik	320.495.600	2	23	02	02:02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Kota Depok	Cakupan Layanan Perpustakaan Keliling	400 titik	320.495.520
2	23	02	02:02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Depok	Jumlah perpustakaan kelurahan	10 Kelurahan	15.000.000	2	23	02	02:02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Depok	Jumlah perpustakaan kelurahan	10 Kelurahan	15.000.000
2	23	02	02:02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kota Depok	Jumlah lomba, Jumlah Bedah Buku dan Jumlah Pelatihan	3 Jenis Lomba; 3 Bedah Buku; 1 pelatihan	184.161.000	2	23	02	02:02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kota Depok	Jumlah lomba, Jumlah Bedah Buku dan Jumlah Pelatihan	1 lomba 1 pelatihan	184.161.000
11.379.538.844										11.379.190.184									

2.2.1. Target Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun 2021

Target capaian indikator kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2016-2021 dan capaian kinerja tahun 2021 yang menggambarkan kinerja perangkat daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3.
Realisasi Kinerja Pelayanan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NPSK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE -						REALISASI CAPAIAN						RASIO CAPAIAN					
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Kepuasan Masyarakat/ IKM (Pengguna Layanan)	-	-	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	-	100%	100%	100%	100%	100%	-
2	Predikat SAKIP				C	C	C	C	B	BB	C	C	C	B	B	BB	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Prosentase OPD Kota Depok Yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Baku	-	-	-	NA	21,40%	21,40%	21,40%	21,40%	21,40%	NA	1,81%	6,79%	21,70%	48,42%	16,74%	Na	63,73%	95,14	101,40%	226,26%	78,22%
4	Prosentase Minat Baca Masyarakat	-	-	-	NA	NA	40%	45%	50%	55%	NA	NA	63,64%	64,88	66,37	-	NA	NA	159,10%	144,17	132,74%	-
5	Jumlah pemustaka/ pengunjung yang datang ke Perpustakaan Kota Depok	-	-	-	27.000 orang	29.000 orang	31.000 orang	33.000 orang	35.000 orang	37.000 orang	42.627 orang	56.978 orang	73.555 orang	80.960 orang	27,345 orang	5.767 orang	250,75%	144,90%	273,27%	254,33%	78,14%	15,59%
5	Jumlah Koleksi Bahan Pustaka	-	-	-	17.000 eksp	22.000 eksp	27000 eksp	32.000 eksp	37.000 eksp	42.000 eksp	23.717 eksp	31.878 eksp	38.767 eksp	44.887 eksp	47.714 eksp	51.150 eksp	139,51%	144,90%	143,58%	122,45%	128,96%	121,79%
7	Jumlah Perpustakaan Yang Dibina	-	-	-	NA	5	15	25 TBM	-	-	NA	5	15	26 TBM	-	-	NA	100%	100%	104%	-	-
	Persentase Perpustakaan Yang Dibina	-	-	-					11,11%	10,42%					3,70%	3,29%					33,34%	31,57%

2.2.2. Pengendalian dan evaluasi Triwulan II terhadap pelaksanaan rencana kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun 2021

Pengendalian dan evaluasi rencana kerja dilakukan untuk memastikan bahwa Rencana Kerja Perangkat daerah telah dijadikan sebagai dasar penyusunan APBD. Dapat diuraikan perbandingan jumlah dan pagu program, serta jumlah kegiatan, konsistensi antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dan APBD Perangkat daerah sebagaimana diuraikan berikut ini.

a. Konsistensi Jumlah Program RKPD Tahun 2020 dan APBD Tahun 2021

Berdasarkan data yang telah diolah, diperoleh kesesuaian jumlah program antara RKPD Tahun 2020 dan APBD Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.4. Kesesuaian Program antara RKPD dan APBD Tahun 2021

Kode Rekening		Urusan/Bidang Urusan	Jumlah Program				% Jml Program APBD thd RKPD	Ket
RKPD	APBD		RKPD	APBD	Sesuai	Tidak sesuai		
1	2	3	4	5	6	7	8 (5/4)	9
2,01	2,01	Urusan Wajib Tidak Berkaitan Langsung Pelayanan Dasar	5	5	5	0	100,00%	
2.23	2.23	Perpustakaan	1	1	1	0	100,00%	
2.24.2.23.0 .00.02.00	2.23.2.24. 2. 23.0.00.0 1.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1	1	1	0	100,00%	-
2.24.	2.24.	Kearsipan	4	4	4	0	100,00%	
2.24.2.23.0 .00.02.00	2.24.2.24. 2. 23.0.00.0 1.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4	4	4	0	100,00%	-

Dari tabel diatas diperoleh gambaran konsistensi jumlah program antara RKPD dan APBD sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 sebagai berikut:

- a) Seluruh kode rekening program sama antara RKPD dan APBD disebabkan pemutakhiran kedua pada tahapan penyusunan KUA PPAS 2021 berdasarkan Kepmendagri 050 Tahun 2020 telah disesuaikan.
- b) Seluruh urusan yang memiliki jumlah program yang sama antara RKPD dan APBD

b. Konsistensi Jumlah Kegiatan

Berdasarkan data yang telah diolah dan disajikan, diperoleh perbandingan antara jumlah kegiatan antara RKPD dengan APBD sebagai berikut :

Tabel. 2.5. Perbandingan antara Jumlah Kegiatan pada RKPD dengan Jumlah Kegiatan pada APBD Tahun 2021

Kode Rekening		Urusan/Bidang Urusan	Jumlah Kegiatan				% Jml Kegiatan APBD thd RKPD	Keterangan
RKPD	APBD		RKPD	APBD	Sesuai	Tidak sesuai		
1	2	3	4	5	6	7	8 (5/4)	9
2,01	2,01	Urusan Wajib Tidak Berkaitan langsung Dengan Pelayanan Dasar	11	12	11	1	125%	
2.23	2.23	Perpustakaan	2	2	2	0	100,00%	
2.24.2.2 3.0.00.0 2.00	2.23.2.2 4.2. 23.0.00. 01.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2	2	2	0	100,00%	-
2.24.	2.24.	Kearsipan	9	10	9	1	111,11%	
2.24.2.2 3.0.00.0 2.00	2.24.2.2 4.2. 23.0.00. 01.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	9	10	9	1	111,11%	1 kegiatan ada di APBD tidak ada di RKPD

Berdasarkan tabel tersebut, kesesuaian antara jumlah kegiatan dalam RKPD dan APBD Kota Depok Tahun 2021, antara lain ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- a) Terdapat kode rekening kegiatan berbeda antara RKPD dan APBD disebabkan pemutakhiran kedua pada tahapan penyusunan KUA PPAS 2021 berdasarkan Kepmendagri 050 Tahun 2020.
- b) Konsistensi Jumlah Kegiatan
 - 1) Total kegiatan dalam RKPD adalah 11 kegiatan (jumlah pada kolom 4) dan total kegiatan dalam APBD adalah 12 kegiatan (jumlah pada kolom 5). Dari jumlah kegiatan pada kedua dokumen tersebut, terdapat 11 kegiatan di APBD yang sesuai dengan kegiatan di RKPD (jumlah kolom 6).
 - 2) Kegiatan yang tidak terdapat di RKPD namun ada di APBD adalah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

c. Konsistensi Jumlah Sub Kegiatan

Berdasarkan data yang telah diolah dan disajikan, diperoleh perbandingan antara jumlah subkegiatan antara RKPD dengan APBD sebagai berikut :

Tabel. 2.6. Perbandingan antara Jumlah Sub Kegiatan pada RKPD dengan Jumlah Sub Kegiatan pada APBD Tahun 2021

Kode Rekening		Urusan/Bidang Urusan	Jumlah SubKegiatan				% Jml SubKegi atan APBD thd RKPD	Keterangan
RKPD	APBD		RKPD	APBD	Sesuai	Tidak sesuai		
1	2	3	4	5	6	7(5-6)	8(5/4)	9
2,01	2,01	Urusan Wajib Tidak Berkaitan Langsung Dengan Pelayanan Dasar	28	27	26	1	96,43%	
2.23	2.23	Perpustakaan	8	8	8	0	100,00 %	
2.24.2.2 3.0.00.0 2.00	2.23.2.2 4.2. 23.0.00. 01.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	8	8	8	0	100,00 %	-
2.24.	2.24.	Kearsipan	20	19	18	1	95,00%	
2.24.2.2 3.0.00.0 2.00	2.24.2.2 4.2. 23.0.00. 01.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	20	19	18	1	95,00%	1 sub kegiatan ada di APBD tidak ada di RKPD, 2 sub kegiatan ada di RKPD tidak ada di APBD

Berdasarkan tabel tersebut, kesesuaian antara jumlah subkegiatan dalam RKPD dan APBD Kota Depok Tahun 2021, antara lain ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- a) Terdapat kode rekening subkegiatan berbeda antara RKPD dan APBD disebabkan pemutakhiran kedua pada tahapan penyusunan KUA PPAS 2021 berdasarkan Kepmendagri 050 Tahun 2020.
- b) Konsistensi Jumlah Sub kegiatan

Total sub kegiatan dalam RKPD adalah 28 sub kegiatan (jumlah pada kolom 4) dan total subkegiatan dalam APBD adalah 27 sub kegiatan (jumlah pada kolom 5). Dari jumlah sub kegiatan pada kedua dokumen tersebut, terdapat 26 sub kegiatan di APBD yang sesuai dengan kegiatan di RKPD (jumlah kolom 6).

- c) Sub Kegiatan yang ada di RKPD namun tidak ada di APBD yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis kantor dan Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Sementara Sub Kegiatan yang tidak ada di RKPD namun ada di APBD yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

d. Konsistensi Pagu Indikatif RKPD dan Pagu Anggaran APBD

Berdasarkan data yang telah diolah dan disajikan, diperoleh perbandingan antara pagu indikatif RKPD dengan pagu anggaran APBD 2021, sebagai berikut :

Tabel. 2.7. Perbandingan antara Pagu Indikatif RKPD dengan Pagu APBD Tahun 2021

Kode Rekening		Urusan/ Bidang Urusan	Jumlah Pagu			% Jml Pagu APBD thd RKPD
RKPD	APBD		RKPD	APBD	Selisih	
1	2	3	4	5	6(5-4)	7 (5/4)
02:23	02:23.00	PERPUSTAKAAN	1.590.636.500	1.590.636.120	- 380	100,00%
2.23.2.24.2. 23.0.00.01.	2.23.2.24.2. 23.0.00.01.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1.590.636.500	1.590.636.120	- 380	100,00%
2.23.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.	2.23.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.590.636.500	1.590.636.120	- 380	100,00%
2.23.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.01.	2.23.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.01.	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.070.979.900	1.070.979.600	- 300	100,00%
2.23.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.01.01.	2.23.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.01.01.	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	23.000.000	23.000.000	-	100,00%
2.23.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.01.02.	2.23.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.01.02.	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	42.000.000	42.000.000	-	100,00%
2.23.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.01.08.	2.23.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.01.08.	Pengembangan Bahan Pustaka	395.980.000	395.979.900	- 100	100,00%
2.23.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.01.09.	2.23.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.01.09.	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	535.000.000	534.999.800	- 200	100,00%
2.23.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.01.10.	2.23.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.01.10.	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	74.999.900	74.999.900	-	100,00%
2.23.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.02.	2.23.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.02.	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	519.656.600	519.656.520	- 80	100,00%
2.23.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.02.01.	2.23.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.02.01.	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	320.495.600	320.495.520	- 80	100,00%

2.23.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.02.02.	2.23.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.02.02.	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	15.000.000	-	100,00%
2.23.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.02.03.	2.23.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.02.03.	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	184.161.000	184.161.000	-	100,00%
02:24	02:24	KEARSIPAN	9.788.902.344	9.788.554.064	- 348.280	100,00%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.	2.24.2.24.2. 23.0.00.01.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	9.788.902.344	9.788.554.064	- 348.280	100,00%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.	2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.359.948.344	8.359.600.444	- 347.900	100,00%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.01.	2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	115.405.000	115.405.000	-	100,00%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.01.01.	2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	87.177.000	87.177.000	-	100,00%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.01.06.	2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28.228.000	28.228.000	-	100,00%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.02.	2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.350.148.344	7.350.148.344	-	100,00%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.02.01.	2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.350.148.344	7.350.148.344	-	100,00%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.06.	2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	669.395.000	669.387.700	- 7.300	100,00%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.06.05.	2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.000.000	60.000.000	-	100,00%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.06.01.	2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	49.995.700	- 4.300	99,99%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.06.02.	2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	171.245.000	171.245.000	-	100,00%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.06.03.	2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	75.000.000	75.000.000	-	100,00%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.06.04.	2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	93.150.000	93.150.000	-	100,00%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.06.09.	2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220.000.000	219.997.000	- 3.000	100,00%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.09.	2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	225.000.000	224.659.400	- 340.600	99,85%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.09.09.	2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	110.000.000	109.700.000	- 300.000	99,73%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.09.01.	2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.000.000	64.983.000	- 17.000	99,97%

2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.09.06.	2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	49.976.400	- 23.600	99,95%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.	2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1.272.750.000	1.272.749.720	- 280	100,00%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.01.	2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.01.	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	872.750.000	872.750.000	-	100,00%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.01.01.	2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.01.01.	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	872.750.000	872.750.000	-	100,00%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.02.	2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.02.	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	170.000.000	170.000.000	-	100,00%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.02.02.	2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.02.02.	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	170.000.000	170.000.000	-	100,00%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.03.	2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.03.	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	230.000.000	229.999.720	- 280	100,00%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.03.01.	2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.03.01.	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	80.000.000	79.999.720	- 280	100,00%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.03.02.	2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.03.02.	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	150.000.000	-	100,00%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 3.	2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 3.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	122.004.000	122.004.000	-	100,00%
2.24.2.24.2. 3.0.00.01.03. 2.01.	2.24.2.24.2. 3.0.00.01.03. 2.01.	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	72.214.000	72.214.000	-	100,00%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 3.2.01.01.	2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 3.2.01.01.	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	72.214.000	72.214.000	-	100,00%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 3.2.02.	2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 3.2.02.	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	49.790.000	49.790.000	-	100,00%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 3.2.02.01.	2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 3.2.02.01.	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	49.790.000	49.790.000	-	100,00%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 4.	2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 4.	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	34.200.000	34.199.900	- 100	100,00%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 4.2.01.	2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 4.2.01.	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	34.200.000	34.199.900	- 100	100,00%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 4.2.01.01.	2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 4.2.01.01.	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	34.200.000	34.199.900	- 100	100,00%
TOTAL PAGU ANGGARAN			11.379.538.844	11.379.190.184	- 348.660	100,00%

Total pagu anggaran dalam RKPD adalah sebesar Rp **11.379.538.844,-**, Pagu anggaran APBD adalah Tahun 2021 sebesar **Rp 11.379.190.184,-** yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2021.

Dari tabel diatas diperoleh data dan informasi antara lain :

- a) Program yang memiliki pagu sama antara RKPD dengan APBD (kolom 6=0), sejumlah 1 (satu) Program, yaitu : Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
- b) Sebanyak 4 (empat) Program, memiliki anggaran APBD lebih kecil dari pagu indikatif RKPD (kolom 6 < 0), yaitu :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Program Pembinaan Perpustakaan
 - Program Pengelolaan Arsip
 - Program Perizinan Penggunaan Arsip

Tabel 2.8. Kriteria Realisasi Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2.	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3.	66 % ≤ 75 %	Sedang
4.	51 % ≤ 65 %	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

2.2.3. Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

Hasil evaluasi Rencana Perangkat Daerah digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran Renstra dapat diwujudkan. Tingkat capaian indikator perangkat daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.9. Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah s.d Triwulan II Tahun 2021

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	RPJMD Murni Th. 2016-2021			RPJMD Perubahan Th. 2016-2021							Keterangan
		Target Kinerja Kondisi Akhir Periode RPJMD (2016-2021)	Realisasi Kinerja Th. 2017	Realisa si Kinerja Th. 2018	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Kondisi Akhir Periode RPJMD (2016-2021)	Realisasi Kinerja TH. 2019	Realisasi Kinerja Th. 2020	Target Kinerja Th. 2021	Realisasi Kinerja Th. 2021	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PERPUSTAKAAN											
1	Jumlah perpustakaan (unit)	1	1	1	Jumlah anggota perpustakaan (orang)	15494	3056	890	2500	907	36,28 %	DISKARPUS
2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang)	37000	56878	73555	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang)	217961	80960	27345	37000	5.767	15,59 %	DISKARPUS
	KERASIPAN											
1	Penerapan pengelolaan arsip secara baku (OPD)	27	4	15	Penerapan pengelolaan arsip secara baku (OPD)	100%	21,7%	48,42%	21,4%	16,74 %	78,22 %	DISKARPUS
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (orang)	625	200	105	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (orang)	65	100	0	50	0	0,00%	DISKARPUS

Berdasarkan data pada tabel diatas, secara umum capaian indikator kinerja perangkat daerah pelaksanaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 yang terdiri 4 indikator, sebagai berikut:

- 1) Sangat tinggi : 0 indikator (0,00 %);
- 2) Tinggi : 1 indikator (25,00 %);
- 3) Sedang : 0 indikator (0,00 %);
- 4) Rendah : 0 indikator (0,00 %);
- 5) Sangat Rendah : 3 indikator (75,00%)

Realisasi Belanja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Realisasi Belanja Tahun anggaran 2021 sampai dengan Triwulan II mencapai 38,41%, masuk kedalam klasifikasi Sangat Rendah. Serapan Belanja dapat dilihat pada Tabel 2.10., sebagai berikut :

Tabel 2.10. Realisasi Belanja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun Anggaran 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	%
2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)
02:23.00	PERPUSTAKAAN	1.590.636.120	532.716.219	1.057.919.901	33,49%
2.23.2.24.2.23.0.00.01.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1.590.636.120	532.716.219	1.057.919.901	33,49%
2.23.2.24.2.23.0.00.01.02.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.590.636.120	532.716.219	1.057.919.901	33,49%
2.23.2.24.2.23.0.00.01.02.2.01.	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.070.979.600	392.136.647	678.842.953	36,61%
2.23.2.24.2.23.0.00.01.02.2.01.01.	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	23.000.000	8.050.000	14.950.000	35,00%
2.23.2.24.2.23.0.00.01.02.2.01.02.	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	42.000.000	18.437.149	23.562.851	43,90%

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok, Tahun 2021

2.23.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.01.08.	Pengembangan Bahan Pustaka	395.979.900	102.156.050	293.823.850	25,80%
2.23.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.01.09.	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	534.999.800	263.493.448	271.506.352	49,25%
2.23.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.01.10.	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	74.999.900	-	74.999.900	0,00%
2.23.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.02.	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	519.656.520	140.579.572	379.076.948	27,05%
2.23.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.02.01.	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	320.495.520	121.019.572	199.475.948	37,76%
2.23.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.02.02.	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	-	15.000.000	0,00%
2.23.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.02.03.	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	184.161.000	19.560.000	164.601.000	10,62%
02:24	KEARSIPAN	9.788.554.064	3.837.978.448	5.950.575.616	39,21%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	9.788.554.064	3.837.978.448	5.950.575.616	39,21%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.359.600.444	3.276.813.808	5.082.786.636	39,20%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	115.405.000	48.135.000	67.270.000	41,71%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	87.177.000	41.120.000	46.057.000	47,17%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28.228.000	7.015.000	21.213.000	24,85%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.350.148.344	2.860.385.926	4.489.762.418	38,92%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.350.148.344	2.860.385.926	4.489.762.418	38,92%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	669.387.700	278.444.782	390.942.918	41,60%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.000.000	46.381.150	13.618.850	77,30%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.995.700	19.753.000	30.242.700	39,51%

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun 2021

2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	171.245.000	123.901.508	47.343.492	72,35%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	75.000.000	35.704.000	39.296.000	47,61%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	93.150.000	17.548.500	75.601.500	18,84%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	219.997.000	35.156.624	184.840.376	15,98%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224.659.400	89.848.100	134.811.300	39,99%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	109.700.000	22.051.100	87.648.900	20,10%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.983.000	31.830.000	33.153.000	48,98%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.976.400	35.967.000	14.009.400	71,97%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1.272.749.720	507.810.640	764.939.080	39,90%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.01.	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	872.750.000	464.323.351	408.426.649	53,20%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.01.01.	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	872.750.000	464.323.351	408.426.649	53,20%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.02.	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	170.000.000	26.419.000	143.581.000	15,54%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.02.02.	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	170.000.000	26.419.000	143.581.000	15,54%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.03.	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	229.999.720	17.068.289	212.931.431	7,42%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.03.01.	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	79.999.720	17.068.289	62.931.431	21,34%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.03.02.	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	-	150.000.000	0,00%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 3.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	122.004.000	53.354.000	68.650.000	43,73%

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun 2021

2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 3.2.01.	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	72.214.000	46.654.000	25.560.000	64,61%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 3.2.01.01.	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	72.214.000	46.654.000	25.560.000	64,61%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 3.2.02.	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	49.790.000	6.700.000	43.090.000	13,46%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 3.2.02.01.	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	49.790.000	6.700.000	43.090.000	13,46%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 4.	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	34.199.900		34.199.900	0,00%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 4.2.01.	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	34.199.900		34.199.900	0,00%
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 4.2.01.01.	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	34.199.900	-	34.199.900	0,00%
Total		11.379.190.184	4.370.694.667	7.008.495.517	38,41%

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA DEPOK

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan belanja daerah Tahun anggaran 2021 sampai dengan Triwulan II antara lain :

1. Belum siapnya modul penatausahaan pada SIPD, input ulang pada SIPKD sehingga memperlambat proses penatausahaan keuangan;
2. Adanya penjadwalan ulang kegiatan;
3. Kekurangcermatan pengelola kegiatan dalam penyusunan RKA/DPA sehingga membutuhkan pergeseran/perubahan penjabaran APBD;
4. Keterbatasan penyediaan dana (mekanisme UP/GU);

2.4. REVIEW USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS

Rancangan awal RKPD kabupaten/kota disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai Pedoman seluruh perangkat daerah dalam menyusun rancangan awal Rencana Kerja perangkat daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Terdapat beberapa perubahan (penambahan dan pengurangan) terhadap Program/Kegiatan Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD. Hasil analisis kebutuhan menunjukkan perlunya penambahan beberapa kegiatan. Perubahan tersebut didasari oleh:

- a. Amanat Permendagri 86 Tahun 2017 terkait waktu dan mekanisme perubahan RPJP dan RPJMD;
- b. Penyesuaian RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021;
- c. Penyesuaian Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun 2016-2021.

Beberapa **perubahan (penambahan) sub kegiatan** yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain:

- a. Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- b. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
- c. Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis

- d. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN

Beberapa **perubahan (pengurangan) sub kegiatan** yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain:

- a. Pengembangan Bahan Pustaka
- b. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
- c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- d. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- e. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- f. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- h. Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
- i. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
- j. Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok disusun untuk mewujudkan suatu dokumen perencanaan pembangunan, sebagai satu kesatuan yang utuh dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2015-2019, RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan RPJMD Kota Depok tahun 2016-2021, dan khususnya merujuk pada Perubahan RKPD Kota Depok tahun 2020

Dalam Undang - undang No.43 tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 1 butir 29 dan 30 disebutkan bahwa Sistem Informasi Kearsipan Nasional menggunakan Jaringan. Informasi Kearsipan Nasional yang disebut SIKN dan JIKN. SIKN dan JIKN merupakan arah kebijakan dibidang kearsipan sebagai tuntutan kemajuan teknologi yang diharapkan sistem ini dilaksanakan oleh semua kabupaten/ kota. Untuk Teknologi Informasi Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Depok sedang mengembangkan Sistem Informasi Manajemen pengelolaan Arsip (Si- Mpok).

Dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dalam membangun transparansi dana akuntabilitas kinerja pemerintahan di Bidang Kearsipan menerapkan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan *e-government* yang mengatur kelembagaan *e-goverenment*, penguatan sistem dan infrastruktur *e-government* yang terintegrasi; penyempurnaan/ penguatan sistem pengadaan secara elektronik; serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.

Dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Pengelolaan Kearsipan di dimulai sejak penciptaan, penyusutan sampai dengan pelestarian dan dilakukan pada semua jenis arsip, yaitu arsip statis dan dinamis. Hal tersebut sudah sesuai dengan kondisi yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok. Sedangkan kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang kearsipan khususnya arsiparis masih sangat terbatas, yaitu hanya ada 2 orang arsiparis. Untuk mengatasi hal tersebut telah

dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang kearsipan.

Arah dan kebijakan Nasional dibidang Perpustakaan dalam Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan adalah adanya Perpustakaan Digital Nasional Indonesia atau yang disebut E.Library, meningkatkan akses layanan Perpustakaan dan pemerataan pelayanan perpustakaan di daerah terpencil. Di Kota Depok Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sudah mengembangkan E-Library dan Pendaftaran Keanggotaan Perpustakaan melalui Whatsapp.

Sedangkan di Bidang Perpustakaan, perkembangan jumlah perpustakaan dalam kurun waktu Tahu 2017-2019 sesuai standar sebagaimana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengalami perkembangan yang fluktuatif. Demikian juga untuk jumlah koleksi perpustakaan pada kurun waktu yang sama senantiasa meningkat.

Peningkatan tersebut berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan. Disisi lain meningkatnya jumlah pengunjung juga dikarenakan meningkatnya minat baca masyarakat, peningkatan tersebut didukung oleh kegiatan perpustakaan keliling. Hal tersebut sudah sesuai dengan kondisi yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok. Sedangkan kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Perpustakaan khususnya Pustakawan sudah cukup memadai, yaitu ada 5 orang Pustakawan. Untuk mengatasi hal tersebut telah dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Perpustakaan.

Namun pada awal Tahun 2020, pandemi COVID-19 membuat kondisi ekonomi global memburuk yang memberikan dampak juga pada terkontraksinya kondisi ekonomi. Implikasi pandemi COVID-19 telah merenggut korban jiwa serta kerugian material sehingga berdampak pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut tentunya mengharuskan pemerintah melakukan berbagai upaya untuk melakukan penyelamatan baik dari aspek kesehatan maupun ekonomi yang berfokus pada belanja di sektor kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*) serta penanganan dampak ekonomi yang didalamnya termasuk dunia usaha dan masyarakat terdampak.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan tekanan terhadap ekonomi dan sosial. Pasca pandemi Covid-19, ekonomi global diperkirakan menuju keseimbangan baru, dimana proses transformasi akan terjadi di 4 (empat)

area: struktural dan digital, perilaku dan kehidupan masyarakat, pola rantai pasok, serta tatanan internasional. Kondisi tersebut dipengaruhi juga kebijakan terkait PPKM Darurat, PPKM Mikro dan PPKM Level 3 dan 4. Hal tersebut berdampak pada pola pelayanan perpustakaan kepada masyarakat dengan tidak melayani perpustakaan umum dan pelayanan perpustakaan keliling. Hal tersebut berdampak pada tidak tercapai pada tahun 2021 di Triwulan II kunjungan perpustakaan dari target 37.000 orang tercapai 5.767 orang atau sebesar 15,59% dan keanggotaan perpustakaan dari target 907 orang tercapai 907 orang atau 36,28%.

Di samping itu penyusunan Rencana Kerja juga memperhatikan hasil evaluasi program dan kegiatan tahun 2019-2020 yang telah dilaksanakan, dan masukan dari berbagai pihak yang berkompeten dan pemerhati kearsipan dan perpustakaan, terutama untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang ada.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA DEPOK

Tujuan merupakan sesuatu yang diinginkan. Tujuan juga bisa digunakan sebagai evaluasi dan pengendalian terhadap misi yang telah disusun. Sementara sasaran merupakan tolok ukur keberhasilan misi yang dijalankan dalam mencapai Tujuan. Berikut ini beberapa tujuan dan sasaran Tahun 2021 sesuai misi Pembangunan Kota Depok 2016 – 2021.

Tabel 3.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kota Depok

VISI: KOTA DEPOK YANG UNGGUL, NYAMAN DAN RELIGIUS		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi I (Pertama): Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan	Meningkatkan kualitas pelayanan	Meningkatnyakualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan publik
Misi II (Kedua): Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing.	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang kreatif dan berdaya saing	1. Meningkatnya kualitas dan akses layanan pendidikan 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 3. Terbangunnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan sosial 4. Berkembangnya potensi dan kreatifitas masyarakat

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok mengemban pada Misi

ke satu dan kedua. Yaitu dengan tujuan :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Kreatif dan Berdaya Saing

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian indikator pembangunan Kota Depok selama kurun waktu Tahun 2019-2020, dan memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis eksternal dan internal yang telah di bahas pada forum perencanaan dan mengacu kepada Renstra 2016-2021, maka dirumuskan isu strategis Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Rendahnya kompetensi Sumber Daya Manusia , dengan sasaran Peningkatan Minat Baca Masyarakat
2. Transparansi Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan, kebijakan yang dilakukan sebagai dasar penentuan program dan kegiatan prioritas diantaranya adalah Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan, Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur, dan Optimalisasi pengawasan dan internal.

Memperhatikan evaluasi kinerja dan Isu-Isu Stategis yang sudah ditetapkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok, tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok
Tahun 2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2021
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan	Meningkatnya kinerja layanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat/ IKM (Pengguna Layanan)	Baik
			Presentase Jumlah Lembaga Pemerintah Yang Telah Mengelola Arsipnya Secara Baku	21,4 %

		Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Predikat Nilai SAKIP	BB
2.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Kreatif dan Berdaya Saing	Meningkatnya akses terhadap layanan perpustakaan	Presentase (%) Minat Baca Masyarakat	55%
			Jumlah Pemustaka/ Pengunjung Yang Datang ke Perpustakaan	35.000
			Jumlah Koleksi Bahan Pustaka (Dalam Eksemplar)	37.000
			Persentase Perpustakaan di Kota Depok Yang Dibina	10,42%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada awal Rencana kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok tahun 2021 mencakup **8 program** yang terdiri dari **12 kegiatan dan 27 sub kegiatan**, dengan uraian sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2	Program Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
			Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN
			Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
3	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun

		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana
4	Program Perijinan Penggunaan Arsip	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/ Kota	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
5	Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
			Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Pengembangan Bahan Pustaka
			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
			Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
			Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca

Tabel 4.1

PEMERINTAH KOTA DEPOK

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P RENJA) TAHUN 2021

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (RKPD)			APBD 2021 (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (RKPD)			BERTAMBAH/ KURANG		ALASAN PERUBAHAN
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	LOKASI	RKPD	APBD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (9-5)	12= (9-7)	13
2.23.	PERPUSTAKAAN			1.590.636.500		1.590.636.120		1.390.470.345		200.166.155	200.165.775	
2.23.2.24.2.23.0.00.01.02.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Minat Baca Masyarakat	55%	1.590.636.500		1.590.636.120	55%	1.390.470.345,00		200.166.155	200.165.775	
2.23.2.24.2.23.0.00.01.02.01.	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Minat Baca Masyarakat	55%	1.070.979.900		1.070.979.600	55%	958.161.300,00		112.818.600	112.818.300	
2.23.2.24.2.23.0.00.01.02.01.01.	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Buku	1000 Buku	23.000.000	Kota Depok	23.000.000	1000 Buku	23.000.000,00	Kota Depok	-	-	
2.23.2.24.2.23.0.00.01.02.01.02.	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan	5 Perpustakaan Sekolah	42.000.000	Kota Depok	42.000.000	5 Perpustakaan Sekolah	42.000.000,00	Kota Depok	-	-	
2.23.2.24.2.23.0.00.01.02.01.08.	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah koleksi perpustakaan	3500 eks; 1 paket e-book; 1 paket dvd	395.980.000	Kota Depok	395.979.900	3500 eks; 1 paket e-book; 1 paket dvd	261.181.800,00	Kota Depok	-134.798.200	-134.798.100	Refocusing, Pengurangan Belanja Surat Kabar
2.23.2.24.2.23.0.00.01.02.01.09.	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Koleksi Perpustakaan	5000 Eksp	535.000.000	Kota Depok	534.999.800	5000 Eksp	534.999.800,00	Kota Depok	-200	-	

2.23.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.01.10.	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	1 Dok	74.999.900	Kota Depok	74.999.900	1 Dok	96.979.700	Kota Depok	21.979.800	21.979.800	Penambahan Jumlah Pengolah Data
2.23.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.02.	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Minat Baca Masyarakat	55%	519.656.600		519.656.520	55%	432.309.045,00		87.347.555	87.347.475	
2.23.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.02.01.	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Cakupan Layanan Perpustakaan Keliling	600 titik	320.495.600	Kota Depok	320.495.520	400 titik	352.474.045,00	Kota Depok	31.978.445	31.978.525	Penambahan Jumlah Jumlah Tenaga Non PNS dan Belanja BPJS
2.23.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.02.02.	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan kelurahan	10 Kelurahan	15.000.000	Kota Depok	15.000.000	10 Kelurahan	15.000.000,00	Kota Depok	-	-	
2.23.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.02.03.	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah lomba, Jumlah Bedah Buku dan Jumlah Pelatihan	3 Jenis Lomba; 3 Bedah Buku; 1 pelatihan	184.161.000	Kota Depok	184.161.000	1 lomba 1 pelatihan	64.835.000,00	Kota Depok	119.326.000	119.326.000	Refocusing, Pengurangan jumlah Lomba
2.24.	KEARSIPAN			9.788.902.344		9.788.554.064		8.992.354.664		796.547.680	796.199.400	
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran dan Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran; NILAI SAKIP; Cakupan integritas perencanaan KIP;	100%; 100%; BB; 100%; 100%	8.359.948.344		8.359.600.444	100%; 100%; BB; 100%; 100%	7.532.465.444,00		827.482.900	827.135.000	
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan integritas perencanaan, Nilai SAKIP	100%,	115.405.000		115.405.000	100%,	78.133.000,00		37.272.000	37.272.000	
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	87.177.000	Kota Depok	87.177.000	3 Dokumen	49.905.000,00	Kota Depok	37.272.000	37.272.000	Refocusing, Pengurangan Belanja Sewa Tempat dan Pengganti Transport Peserta

2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	2 Dok	28.228.000	Kota Depok	28.228.000	2 Dok	28.228.000,00	Kota Depok	-	-	
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	BB	7.350.148.344		7.350.148.344	BB	6.699.003.344,00		-	-	
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Anggaran	2 Dok	7.350.148.344	Kota Depok	7.350.148.344	2 Dok	6.699.003.344,00	Kota Depok	-	-	Refocusing, Pengurangan Belanja TPP 13 dan 14
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran dan Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	100%; 100%	669.395.000		669.387.700	100%; 100%	530.669.700		-	-	
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	20 Jenis	60.000.000	Kota Depok	60.000.000	20 Jenis	60.000.000,00	Kota Depok	-	-	
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17 Jenis	50.000.000	Kota Depok	49.995.700	17 Jenis	49.995.700,00	Kota Depok	-	4.300	
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis inventaris Kantor; Jenis Alat Tulis Kantor	7 Jenis; 70 Jenis	171.245.000	Kota Depok	171.245.000	3 Jenis; 70 Jenis	140.659.000,00	Kota Depok	-	-	Refocusing, Pengurangan jumlah Belanja Perlengkapan Kantor
2.24.2.24.2.23.0. 00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	30 Jenis	75.000.000	Kota Depok	75.000.000	7 Jenis	75.000.000,00	Kota Depok	-	-	
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Makanan dan Minuman	7 Jenis	93.150.000	Kota Depok	93.150.000	7 Jenis	55.460.000,00	Kota Depok	-	-	Refocusing, Pengurangan Volume Belanja Makan Minum
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	200 OH DD; 174 OH LD	220.000.000	Kota Depok	219.997.000	100 OH DD; 146 OH LD	149.555.000,00	Kota Depok	-	-	Refocusing, Pengurangan Volume Belanja Perjalanan Dinas
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran dan Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	100%	225.000.000		224.659.400	100%	224.659.400		-	-	

2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas	7 Kendaraan Roda 4; 3 kendaraan Roda 2; 1 kendaraan roda 3	110.000.000	Kota Depok	109.700.000	7 Kendaraan Roda 4; 2 kendaraan Roda 2; 1 kendaraan roda 3	109.700.000,00	Kota Depok	- 300.000	-	
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	8 Jenis	65.000.000	Kota Depok	64.983.000	8 Jenis	64.983.000	Kota Depok	- 17.000	-	
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 1.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Gedung Yang Dipelihara	2 Gedung	50.000.000	Kota Depok	49.976.400	2 Gedung	49.976.400,00	Kota Depok	- 23.600	-	
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pengelolaan dan Layanan Lembaga Kearsipan Daerah	21,4%	1.272.750.000		1.272.749.720		1.312.130.320,00		39.380.320	39.380.600	
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.01.	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Layanan Lembaga Kearsipan Daerah	21,4%	872.750.000		872.750.000	21,4%	1.040.119.800,00		167.369.800	167.369.800	
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.01.01.	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah pengelolaan arsip dinamis	22 PD%	872.750.000	Kota Depok	872.750.000		1.040.119.800,00	Kota Depok	167.369.800	167.369.800	Penambahan Pengolah Arsip Dinamis dan Belanja Box Arsip
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.02.	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Layanan Lembaga Kearsipan Daerah	21,4%	170.000.000		170.000.000,00	21,4%	95.711.000,00		74.289.000	74.289.000	
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.02.02.	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip yang di Akuisisi Jumlah lomba	50 Berkas; 1 lomba	170.000.000	Kota Depok	170.000.000,00		95.711.000,00	Kota Depok	- 74.289.000	- 74.289.000	Refocusing, Pengurangan Jumlah Peserta Coching Klinik Arsip
2.24.2.24.2.23. 0.00.01.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan e-Government yang terintegrasi, Persentase Pengelolaan dan Layanan Lembaga Kearsipan Daerah dan Persentase pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi	21,4%	230.000.000		229.999.720,00	21,4%	176.299.520,00		53.700.480	53.700.200	

2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.03.01.	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah sistem dipelihara; Jumlah pelayanan jasa kearsipan	1 sistem; 120 orang	80.000.000	Kota Depok	79.999.720,00	1 sistem; 120 orang	140.311.520,00	Kota Depok	60.311.520	60.311.800	Penambahan up grade sisitem kearsipan
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 2.2.03.02.	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang; Jumlah peserta workshop	100 orang; 100 orang	150.000.000	Kota Depok	150.000.000,00	50 orang; 50 orang	35.988.000,00	Kota Depok	114.012.000	-	Refocusing, Pengurangan Belanja Sewa Tempat , Jumlah Peserta dan Pengganti Transport Peserta
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 3.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Pengelolaan dan Layanan Lembaga Kearsipan Daerah	21,4%	122.004.000		122.004.000		122.004.000,00		-	-	
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 3.2.01.	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Persentase Pengelolaan dan Layanan Lembaga Kearsipan Daerah	21,4%	72.214.000		72.214.000	21,4%	72.214.000,00		-	-	
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 3.2.01.01.	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	jumlah titik	25 titik	72.214.000	Kota Depok	72.214.000	21,4%	72.214.000,00	Kota Depok	-	-	
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 3.2.02.	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Layanan Lembaga Kearsipan Daerah	21,4%	49.790.000		49.790.000	25 titik	49.790.000,00		-	-	
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 3.2.02.01.	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Lokasi	25 lokasi	49.790.000	Kota Depok	49.790.000	21,4%	49.790.000,00	Kota Depok	-	-	
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 4.	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Pengelolaan dan Layanan Lembaga Kearsipan Daerah	21,4%	34.200.000		34.199.900	25 lokasi	25.754.900,00		-	-	

2.24.2.24.2.23. 0.00.01.04.2.01 .	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Layanan Lembaga Kearsipan Daerah	21,4%	34.200.000		34.199.900	21,4%	25.754.900,00		8.445.100	8.445.000	
2.24.2.24.2. 23.0.00.01.0 4.2.01.01.	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Pedoman Kearsipan	1 pedoman	34.200.000	Kota Depok	34.199.900	21,4%	25.754.900	Kota Depok	8.445.100	8.445.000	Refocusing, Pengurangan Belanja Perjalanan Dinas
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA DEPOK				11.379.538.844		11.379.190.184		10.382.825.009		996.713.835	996.365.175	

BAB V PENUTUP

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok sebagai Perangkat Daerah teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan dan perpustakaan yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan di bidang kearsipan dan perpustakaan pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efisien dan seefektif mungkin.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahunan daerah yang berlandaskan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021. Perubahan RKPD Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Dengan demikian ada keselarasan antara tema dan prioritas Kota Depok dengan tema dan prioritas Provinsi Jawa Barat maupun Nasional.

Kesimpulan dengan adanya penetapan perubahan Rencana Kerja (Renja) Periode 2021 ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tupoksi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok terdapat serta memberikan gambaran bagi pemerintahan daerah untuk terus berupaya memperbaiki kinerja PD dalam rangka pencapaian hasil kinerja. Keberhasilan program kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang diperoleh, Mengingat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Juga mengemban tugas penting dalam penyedia dokumen informasi. Perubahan RENJA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja OPD di masa mendatang agar diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik ditahun berikutnya.

a. Catatan yang Perlu Mendapat Perhatian

Adanya gerakan tertib arsip yang dicanangkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang harus menjadi perhatian penting untuk Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok. Untuk mewujudkan gerakan tersebut, maka dibutuhkan SDM yang kompeten dalam bidang kearsipan, serta sarana dan prasarana kearsipan yang memadai dan mendukung proses Perubahan Renja Tahun 2021 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok tersebut. Sedangkan, di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan hanya ada beberapa SDM yang kompeten di bidang kearsipan dan sarana prasarana yang kurang memadai untuk mewujudkan gerakan tersebut.

b. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun 2021, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :

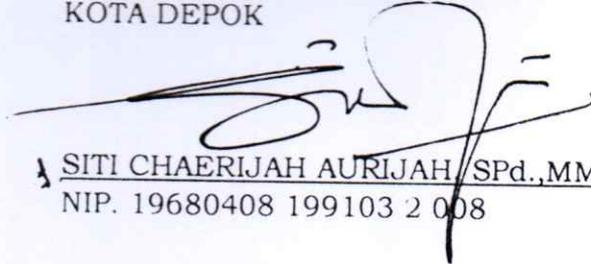
- a. Melaksanakan Renja Tahun 2021 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
- b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2021.

c. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2021, selanjutnya Perubahan Renja Tahun 2021 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Depok, Agustus 2021

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KOTA DEPOK



SITI CHAERIJAH AURIJAH/SPd.,MM.
NIP. 19680408 199103 2 008